BAB IV
KONFLIK MILITER DI SURAKARTA TAHUN 1948

A. Latar Belakang

Periode awal tahun 1948 hingg menjelang Agresi Militer Belanda jilid II, dunia militer Republik Indonesia mengalami permasalahan yang amat pelik. Di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang notabene sebagai ujung tombak penjaga kedaulatan Republik Indonesia, mengalami keretakan-keretakan. TNI terancam keharmonisannya. Salah satu peristiwa yang mencolok yakni terjadinya bentrokan antara Pasukan Siliwangi dan Panembahan Senopati di Surakarta.

Konflik ini agaknya berpangkal dari permasalahan ideologi dan politik. Kala itu, di dalam dunia politik Indonesia terjadi perang ideologi mengenai bagaimana cara terbaik mengelola negara yang baru lahir ini, dan di saat yang bersamaan harus mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman Belanda. Pertentangan itu melibatkan tiga ideologi besar, yakni: nasionalisme; komunisme; dan Islamisme. Ketiganya berusaha mencari jalannya sendiri-sendiri untuk mengelola dan menyelamatkan Indonesia dari ancaman penjajah. Di dalam konteks ini, bentrokan militer yang terjadi sebenarnya hanya sebagai tahapan ‘pendahuluan’ dari tujuan utamanya, yaitu: Pemberontakan PKI Madiun.

Terlepas dari itu semua, konflik ini tak bisa terlepas dari kondisi politik yang terjadi pada awal 1948. Setidaknya ada tiga peristiwa penting yang melatar belakangi konflik itu, yakni: Persetujuan Renvile; jatuhnya kabinet Amir Syarifudin; peristiwa Hijrah Siliwangi; dan berkembangnya komunisme.

Agresi Militer pertama Belanda pada 21 Juli 1947, akhirnya menggiring RI dan Belanda ke dalam sebuah perundingan. Pada 17 Januari 1948 kedua belah pihak sepakat untuk mendandatangani Persetujuan Renvile. Persetujuan ini tak hanya merugikan RI secara politik, namun juga berimbas besar terhadap militer Indonesia. Pasal-pasal persetujuan gencatan senjata dari Persetujuan Renville yang dianggap sangat merugikan TNI, antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa suatu perintah tinggal tetap (*stand fast*) dan dikeluarkan oleh kedua pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditandatangani

persetujuan ini dan akan berlaku sepenuhnya di dalam empat puluh delapan jam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua belah pihak di sepanjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia Belanda pada 29 Agustus 1947, yang akan dinamakan garis status quo, dan di daerah-daerah seperti yang dimaksud dalam ayat berikut.

2. Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan diadakan bentuk daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara (*militerized*-zone), pada umumnya sesuai dengan garis status quo, tersebut di atas, daerah-daerah itu pada pokoknya mengenai daerah-daerah diantara garis status quo, dan dis atu pihak garis kedudukan Belanda yang terkemuka dan di lain pihak garis kedudukan Republik yang terkemuka lebarnya rata-rata daerah itu kira-kira sebanding.[1]

Mengenai pemindahan pasukan-pasukan TNI yang termasuk dalam daerah "*dreamline van Mook*" terdapat pasal-pasal yang berbunyi sebagai berikut.

1. Kesatuan dari pasukan-pasukan TNI yang masih berada di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda akan dipindahkan ke daerah mereka sendiri dengan membawa senjata, perlengkapan serta alat-alat perang.
2. Pemindahan ini akan dilakukan dengan bantuan dan di bawah pengawasan pembantu-pembantu militer dan Komisi Tiga Negara. Instruksi-instruksi selanjutnya akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing setelah bermusyawarah dengan pembantu-pembantu tersebut dan dengan pembesar-pembesar pihak lain.
3. Pemindahan-pemindahan akan dilaksanakan dan diselesaikan selekas mungkin, selambat-lambatnya dalam 21 hari setelah penandatanganan dan perjanjian gencatan senjata.[2]

---

[1] Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, 1972, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Agkatan Darat*, Bandung: Fa. Mahjuma, hlm. 141.

[2] *Ibid*, hlm. 141-142.

Persetujuan Renvile ini ternyata banyak memakan korban. Korban pertama adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin. Pada 23 Januari 1948, pemerintah mengumumkan secara resmi pembubaran Kabinet Amir Syarifudin dan mengangkat Muhammad Hatta sebagai perdana menteri baru. Kabinet baru ini seakan kian memperburuk kondisi militer kala itu. Kebijakan Kabinet Hatta yang dianggap paling komtroversial adalah program Reorganisasi-Rasionalisasi (Re-Ra) di dalam tubuh TNI.

Ternyata isu militer pada waktu itu merupakan komoditi yang paling laris di dalam dunia politik RI. Atmosfer politik di Indonesia pun kembali menghangat. Kebijakan Re-Ra ini mendapat tentangan dan kritik keras oleh golongan kiri: PKI pimpinan Muso dan FDR pimpinan Amir Syarifudin. Mereka lantas berusaha menggalang kekuatan sebanyak-banyaknya untuk menentang kebijakan ini. Kelompok ini kemudian melakukan propaganda-propaganda berbau politis di dalam tubuh TNI. Salah satu sasarannya adalah Pasukan Siliwangi. Golongan kiri menuduh Pasukan Siliwangi adalah alat pemukul yang dimiliki Kabinet Hatta sebagai pemimpin pemerintahan yang menerima rencana Spoor berupa peleburan TNI dalam KNIL yang komando tertingginya dipegang oleh Jenderal Spoor.[3]

Sementara itu, kondisi politik di Republik Indonesia yang cenderung fluktuatif menambah keruh suasana. Naik turunnya suhu politik berbanding lurus dengan silih bergantinya kabinet. Perbedaan halauan dan ideologi mengenai bagaimana mengelola negara yang baru merdeka sekaligus mempertahankannya dari ancaman penjajahan kembali oleh Belanda adalah penyebabnya. Salah satunya adalah ideologi komunis melalui wadah FDR dan merupakan salah satu kekuatan besar politik kala itu.[4]

Gerakan kaum komunis ini semakin terasa gaungnya sekitar akhir 1948, setelah kembalinya salah satu tokoh komunis kawakan, yaitu Muso. Ia merupakan

---

[3] Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948, Jendral Spoor (Operate Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No.1*), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006. hlm. 148.

[4] *Ibid*.

buron pemerintah Belanda kala pemberontakan komunis meletus di Banten 1926. Sejak itu, selama bertahun-tahun ia mencari suaka dan menetap di Uni Soviet. Pada 11 Agustus 1948, untuk pertama kalinya Muso menginjakkan kakinya lagi di Yogyakarta.[5] Kali ini ia datang dengan paspor atas nama Suprapto, nama samarannya sebagai sekertaris Supriono, seorang pejabat yang pernah diutus oleh pemerintah RI guna mengadakan perundingan-perundingan dengan Uni Soviet.[6]

Melalui FDR, Muso mulai mengadakan "koreksi" terhadap kebijakan-kebijakan politik RI. Pada akhirnya, gerakan FDR dapat sepenuhnya diambil alih oleh PKI pada 1 September 1948.[7] Dan setelah itu, Muso beserta para anggota Polit Biro: Amir Syaarifuddin, Setiadjit, dan Wikana aktif melakukan safari politiknya di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di setiap daerah yang disinggahinya mereka berorasi untuk membakar semangat revolusioner rakyat, berikut adalah salah satu petikannya:

"*Revolusi Indonesia dalam tiga tahun ini terakhir ini, tidak begitu berhasil, karena dipimpin oleh kaum borjuis. Karena itu kaum protelar harus merebut kepemimpinan apabila revolusi nasional ingin berhasil, apabila PKI memimpin revolusi, keadaan akan kambali normal. Perekonomian yang masih bersifat "aristokratis, keningratan" harus berubah. Perjanjian Linggajati dan Renville harus dibatalkan dan Republik harus segera menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia. Sikap "menjilat" pemerintah Hatta terhadap Amerika Serikat harus dihentikan, karena ini hanya mengakibatkan bertambahnya bantuan Amerika terhadap Belanda, dan akan mengakibatkan Indonesia untuk terlibat di dalam kolonialis baru. Karena itu strategi yang tepat untuk menghadapi Belanda adalah "bunuh orang-orang Belanda sebanyak mungkin dan rebut senjatanya.*

[5] Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. 2008. *Hijrah Siliwangi.* Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat., hlm. 95.

[6] Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, 1972, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat*, Bandung: Fa. Mahjuma, hlm. 148.

[7] Suratmin, 2012, *Kronik Peristiwa Madiun PKI 1948,* Yogyakarta: Matapadi Pressindo, hlm. 12.

PKI menghormati agama, apabila di dalam sekarang ini, kaum muslim merasa ditindas oleh pemerintah Hatta, sekarang saatnya untuk berjihad fi sabilillah."[8]

Serangan-serangan dari oposisi tersebut semakin memanaskan suhu politik kala itu hingga akhirnya meletuslah pemeberontakan PKI di Madiun. Namun, sebelum peristiwa itu terjadi mereka telah mengadakan konsolidasi dan insiden-insiden pendahuluan yang tercantum dalam rencana operasi antara lain sebagai berikut:

1. Pasukan-pasukan yang berada di bawah pengaruh PKI Muso ditarik dari medan pertempuran dan dipindahkan ke daerah-daerah yang dipandang strategis.
2. Daerah Madiun dijadikan sektor gerilya yang kuat untuk menjutkan perjuangan jangka panjang (*op lang termijn*).
3. Daerah Solo dijadikan "Wild West" agar perhatian umum tertuju ke sana.
4. Di samping tentara "resmi" akan dibentuk juga tentara "ilegal."
5. Diadakan demonstrasi-demonstrasi besar-besaran yang disusul dengan pemogokan-pemogokan umum, jika perlu dengan tindakan kekerasan.[9]

B. Serangan terhadap Markas Siliwangi di Surakarta

Konflik militer di Surakarta secara luas dilihat dari kebesaran nama Divisi Siliwangi dan Divisi Panembahan Senopati, namun secara khusus hanya melibatkan bagian-bagian dari kedua divisi tersebut yang dalam hal ini adalah kesatuan setingkat batalyon. Panembahan Senopati yang secara kompak menolak adanya Rasionalisasi, namun tidak semua batalyonnya adalah penentang pemerintah. Sebagian besar prajurit Panembahan Senopati menjunjung kesetiaan kepada pemimpin sehingga turut mendukung keputusan Letnan Kolonel Soetarto

[8] Himawan Sutanto, 2006, *Madiun dari Republik ke Republik*. Jakarta: Kata, hlm. 79-80.

[9] Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Op. Cit*., hlm. 150. Lihat juga Tim JARAHDAM VI/ SILIWANGI, 1977, *Album Kenangan Kodam VI/ Siliwangi 1946-1977*, Bandung: JARAHDAM VI/ SILIWANGI, hlm. 29.

menolak Rasionalisasi. Tindakan menentang Rasionalisasi itu mendapat dukungan dari Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan oposisi pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta. Kabinet Muhammad Hatta sendiri memiliki pasukan Siliwangi sebagai kekuatan militer yang siap digerakkan ke segala arah untuk melancarkan segala urusan yang dapat dibantu dengan kekuatan militer. Memandang situasi ini, konflik ini tidak terjadi sebatas sebagai konflik militer yang memunculkan nama Divisi Siliwangi dan Divisi Panembahan Senopati. secara luas.

Telaah kajian tentang konflik ini secara nasional adalah bentuk fisik dari kepanjangan tangan langkah Pemerintah dan FDR (komunis) untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan atas pemerintahan Republik Indonesia. Kajian secara global internasional atau " Politik tingkat atas "[10] antara kepentingan Amerika untuk menekan dan menghilangkan pengaruh komunis di Indonesia.[11] Konflik militer itu dipandang sebagai puncak meruncing dari segitiga kepentingan pihak-pihak yang bermain di belakang peristiwa Surakarta tersebut. Gambaran samar kedudukan FDR, Pemerintah, Siliwangi, dan Panembahan Senopati dalam konflik ini akan coba di perjelas dalam kajian di bab ini.

Kedekatan FDR dengan Panembahan Senopati memang sudah terjalin sejak awal didengungkannya rencana Rasionalisasi oleh pemerintah, ikatan pertemanan yang akrab antara pemimpin Panembahan Senopati dan beberapa tokoh penting FDR[12], dan dukungan atas oposisi secara politis oleh divisi tersebut

[10]Konflik Siliwangi dengan Panembahan Senopati di Surakarta dikorelasikan dengan kondisi poitik nasional dan internasional, konflik tersebut merupakan salah satu benturan kepentingan dari politik tingkat atas atau politik internasional secara luas .

[11]Teori provokasi dilancarkan oleh Amerika Serikat dengan mendekati Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membasmi komunis di Indonesia dan sebagai imbalannya, Indonesia akan dibantu dalam hal persengketaan dengan Belanda. D.N.Aidit dalam buku Soe Hok Gie, *Orang-orang di persimpangan kiri jalan*. (Yogyakarta : Bentang, 1997), hlm. 277-278.

[12]Diketahui markas Panembahan Senopati di Solo dihiasi dengan gambar Marx dan Lenin dalam ukuran besar di temboknya dan bahkan dalam bendera divisi terdapat gambar bintang merah yang besar diatas gambar burung garuda.

diperhitungkan dengan benar. Sikap Panembahan Senopati yang menolak rencana Rasionalisasi tentu akan membutuhkan dukungan dari sekutu sipil dalam hal ini adalah FDR. Sejak penghujung Februari 1948 telah terjalin kesepakatan diam-diam yang berhasil dicapai antara Panembahan Senopati yang memprediksikan bahwa Rasionalisasi adalah rencana peningkatan kekuatan Kementrian Pertahanan untuk berada di atas kekuatan Militer, dengan FDR yang juga mencari dukungan dan kekuatan untuk mendapatkan kembali kursi kekuasaan.[13]

Pasukan Panembahan Senopati yang ditengarai adalah pasukan pro FDR dan menentang Rasionalisasi menjadi titik tumpu bagi kekuatan oposisi pemerintah yang menggalang kekuatannya di bawah pimpinan Amir Syarifudin dan tokoh tokoh dari golongan komunis antara lain Resimen I Letkol Subandi dari laskar rakyat, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) pimpinan Achmad Jadau dan sebagian kecil dari anggota TNI Divisi IV.[14] Penolakan kebijakan Rasionalisasi juga dilakukan oleh panglima Divisi IV Panembahan Senopati Kolonel Soetarto yang kemudian mengukuhkan kedudukannya bersama laskar dan TNI masyarakat yang terancam menjadi korban pemangkasan prajurit dengan membentuk formasi baru KPPS (Komando Pertempuran Panembahan Senopati).

Rencana FDR untuk membuat kekacauan di Surakarta dengan menggandeng Panembahan Senopati dan menyerahkan jalannya rencana itu pada Kolonel Soetarto dibantu oleh Letnan Kolonel Soeadi, Letnan Kolonel Soejoto dan Letnan Kolonel Jadau.[15] Langkah pertama yang dilakukan Soetarto adalah merapatkan

---

R.Jokosuyono yang pernah dipilih oleh Amir Syarifudin pada tahun 1946 untuk mengepalai bagian koordinasi kelaskaran dalam Kementrian Pertahanan, pada masa sebelum perang adalah seorang anggota SPI Madiun di mana Sutarto adalah ketuanya. Terlebih lagi Sutarto sempat menjadi teman kepercayaan dekat Alimin, seorang pemimpin komunis sebelum perang. *Merdeka*, 4 Juli 1948.

[13]Julius Pour, *Ign.Slamet Riyadi; Dari Mengusir Kempetai sampai menumpas RMS,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 24.

[14]Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI dalam Karesidenan Surakarta 29 Djanuari -19 Desember 1948*.

[15]Lihat lampiran 4 : ANRI, *Laporan mengenai siasat Letnan Kolonel Soejoto untuk merebut (menguasai) Karesidenen Surakarta. 25-9-1948*.

barisan pendukungnya dalam Divisi IV Panembahan Senopati dan menyingkirkan kesatuan-kesatuan pro pemerintah yang ada di Surakarta. Kesatuan yang tidak tunduk pada Divisi IV antara lain BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia) pimpinan Letnan Kolonel Mardjuki, Banteng dan Laskar Rakyat yang tergabung dalam Brigade 24 pimpinan Letnan Kolonel Iskandar. Pelucutan senjata terhadap Brigade 24 ini kemudian memicu insiden pertempuran antara Resimen V BPRI Letnan Kolonel Mardjuki dengan Resimen 26 Letnan Kolonel Suadi bersama Tentara Pelajar Solo Kapten Achmadi dalam upaya penertiban terhadap pembangkang terhadap Divisi IV. Program Rasionalisasi yang tetap dijalankan oleh pemerintahan Muhammad Hatta memaksa Soetarto untuk tunduk karena Jendral Sudirman sendiri yang datang ke Surakarta untuk menemui Soetarto. Sikap patuh prajurit dan protesnya terhadap rencana FDR untuk mengadakan pemberontakan kepada Pemerintah menjadi petaka bagi Soetarto ketika akhirnya dia masuk dalam daftar rencana FDR sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Letnan Kolonel Suadi awalnya juga akan dibunuh bersama Soetarto, namun Letnan Kolonel Suadi bersedia menjadi Panglima Divisi IV menggantikan Soetarto dan menyerahkan kendali siasat FDR pada Letnan Kolonel Soejoto untuk meneruskan rencana FDR.[16] Kolonel Soetarto dibunuh dengan ditembak di depan rumahnya sendiri di Kampung Timuran pada 2 Juli 1948 pukul 19.30[17] sebagai tindak lanjut rencana FDR membuat suasana kacau di Surakarta.

Kolonel Soetarto panglima Komando Pertempuran Panembahan Senopati (KPPS) memiliki pengaruh dan wibawa yang besar dikalangan pasukan Panembahan Senopati, hal ini selain Soetarto sebagai Panglima divisi, juga karena relasinya yang kuat dalam menjalin hubungan dengan golongan oposisi FDR serta tindakannya dalam merangkul segenap kesatuan tentara baik reguler

---

[16]*Ibid.*

[17]ANRI, *Inventaris Arsip Kepolisian Republik Indonesia 1947-1949 No. 892*. Lihat Julianto Ibrahim, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan; Kekerasan dan Kriminalitas Masa Revolusi di Surakarta,* (Surakarta : Bina Citra Pustaka, 2004), hlm. 173.

maupun non-reguler yang ada di Surakarta dan menjadikan mereka sebagai badan ketentaraan resmi di bawah Komando Pertempuran Panembahan Senopati. Penembakan terhadap Soetarto itu membawa dampak pukulan moril yang berat bagi Pasukan Panembahan Senopati karena kehilangan sosok panglima yang mengayomi dan menghargai hak-hak prajurit sepenuhnya meskipun berasal dari kalangan tentara bawah.

Kondisi Panembahan Senopati semakin tertekan dan terancam menyusul peristiwa penculikan atas perwira-perwiranya yang secara psikologis merupakan penghinaan bagi Kesatuan Panembahan Senopati. Penculikan ini terjadi pada 8 September 1948 terhadap Letnan Kolonel Suherman ketika menjalankan tugasnya untuk memimpin penyelidikan atas peristiwa pembunuhan Kolonel Soetarto.[18]

Penculikan berlanjut dengan hilangnya Letnan Kolonel Sumarto[19] ,Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Supardi, Kapten Suradi dan Letnan Mulyono dari Brigade 9/KPPS, Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI).[20] Peristiwa pembunuhan dan penculikan yang menimpa Kesatuan Panembahan Senopati ini menimbulkan berbagai prasangka buruk terutama terhadap Divisi Siliwangi yang telah lama berada di Surakarta yang dengan keberadaannya telah menjadi permasalahan bagi keamanan Surakarta dan memicu kecemburuan karena posisi istimewa yang di dapatkan Siliwangi sebagai Batalyon Mobile yang tidak ditempatkan pada garis pertahanan.

Rasa curiga dan tidak senang terhadap prajurit Siliwangi sebenarnya sudah terjadi sejak awal sebelum terjadi pembunuhan dan penculikan terhadap perwira-

---

[18]David Charles Anderson , *Kudeta Madiun 1948*, (Yogyakarta : Media Pressindo 2008), hlm. 33.

[19]Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember ; Jendral Spoor (operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat No.1)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2006), hlm. 197.

[20]Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm 235. Lihat Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenen Surakarta, 7 -9-1948*, hlm. 5.

perwira Panembahan Senopati. Pasukan Siliwangi terlibat dalam aksi-aksi kriminal seperti merampok, membeli tanpa bayar dan meresahkan masyarakat Surakarta sehingga Pasukan Panembahan Senopati mengepung markas Siliwangi dalam hal ini adalah Batalyon Rukman yang bermarkas di Tasikmadu.[21]Tindakan kriminal pasukan Siliwangi ini disebabkan karena kondisi pasukan yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan fasilitas yang tidak memadai. Kekurangan stok logistik memicu pasukan Siliwangi melakukan penjarahan pada pabrik gula dan memang di akui oleh komandan pasukan Siliwangi bahwa ada anak buahnya yang berlaku tidak disiplin. Komandan pasukan Siliwangi menganggap ini adalah masalah internal kesatuan dan akan diselesaikan sendiri sebagai bentuk otoritas komandan kepada prajuritnya yang tidak disiplin.

Tanggal 20 Agustus 1948 markas Siliwangi dikepung atas perintah Sub Teritorial Commando (STC) karena tindakan Silliwangi dianggap sebagai gerombolan pengacau dan melalui Komando Daerah Militer (KDM) Karanganyar menuntut penyerahan anggota Siliwangi yang terlibat dalam aksi kriminal tersebut serta mengembalikan barang-barang yang telah diambil atau hasil dari penggedoran yang dilakukan gerombolan liar Siliwangi. Tuntutan KDM Karanganyar tidak dapat dipenuhi oleh pimpinan Batalyon Siliwangi karena menganggap aksi kriminal itu adalah masalah indispliner prajurit Siliwangi dan akan diselesaikan secara internal.[22]

Batalyon Siliwangi di bawah komando Letnan Kolonel Rukman menuntut balik kepada pihak KDM untuk menarik pasukan yang mengepung markas batalyonnya namun tuntutan itu juga tidak dipenuhi oleh pihak KDM sehingga ketegangan semakin memuncak pada 23 Agustus ketika Panembahan Senopati mengeluarkan ultimatum agar Batalyon Rukman (Siliwangi) menyerah dan perintah itu ditolak. Pada 24 Agustus 1948 markas Batalyon Rukman diserang oleh pasukan Panembahan Senopati dengan turut mengerahkan kekuatan

[21]*Ibid*., hlm. 233.
[22]*ANRI, Perintah Harian Markas Besar Angkatan Perang, 24 -8-1948.*

rakyat.[23]Serangan terhadap Batalyon Rukman dapat dipatahkan dan pihak penyerang berhasil dipukul mundur hingga dalam upaya penyelesaian dilakukan perundingan antara kedua pihak yang menghasilkan putusan pemenuhan tuntutan dari Komando Militer Kota (KMK) Surakarta, STC dan KPPS untuk menempatkan Batalyon Rukman di luar Surakarta.[24]

Babak perseteruan berikutnya adalah peristiwa Srambatan[25] yang melibatkan Mayor Slamet Riyadi dan dua Batalyon eks TLRI dengan pasukan Siliwangi kompi Lucas (Kompi Pengawalan Brigade Siliwangi II di bawah pimpinan Kapten Oking) dan dibantu oleh Kompi Komir dari Batalyon 2/Brigade II Siliwangi.[26] Serangan dimulai oleh pasukan Mayor Slamet Riyadi yang melakukan manuver latihan kemudian secara mendadak menyerang asrama pasukan Siliwangi. Serangan ini didahului dengan keluarnya ultimatum dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati[27] untuk melepaskan perwira-perwiranya yang ditahan di markas Srambatan.

Ultimatum itu tidak diindahkan oleh pasukan Siliwangi karena merasa tidak terlibat dan tidak tahu menahu mengenai hilangnya perwira-perwira Panembahan Senopati. Kecurigaan mengarah pada Siliwangi karena penculikan perwira-

---

[23]Soe Hok Gie, *op.cit.*, hlm. 234. Lihat lampiran 4 : ANRI, Kepolisian Negara No.40. *Laporan mengenai siasat Letnan Kolonel Soejoto untuk merebut Karesidenan Surakarta,* 26-9-1948.

[24]Himawan Soesanto, *op. cit.*, hlm. 194.

[25]Lokasi penyerangan di Tasikmadu dan Srambatan Kabupaten Karanganyar lihat Lampiran 5.

[26]Himawan Soesanto, *op.cit* .,hlm.195.

[27]Tanggal 10 September 1948 Komandan Komando Pertempuran Panembahan Senopati mengeluarkan ultimatum kepada kesatuan yang bermarkas di Srambatan setelah peringatan pertama diatas ternyata tidak mendapatkan perhatian. Dalam ultimatum tersebut antara lain dinyatakan “jika sampai dengan tanggal : 13 September 1948 jam 14.00, lima orang perwira TNI (Panembahan Senopati) yang diculik tidak diserahkan kembali kepada KPPS akan diadakan tindakan tegas”.Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenan Surakarta.*

perwira Panembahan Senopati terjadi didekat Srambatan dimana para tawanan lain juga ditahan disana, dan sepeda dari kelima perwira itu juga ditemukan di dekat Srambatan.[28] Mendekati waktu yang telah ditetapkan dalam ultimatum Panembahan Senopati, yang disetujui Panglima Besar Sudirman, Letnan Kolonel Soeadi memerintahkan Mayor Slamet Riyadi selaku Komandan Brigade V Panembahan Senopati dan dua Batalyon dari TLRI untuk mempersiapkan diri mengepung asrama Srambatan.

Mayor Sutarno dari Brigade TLRI yang dikirim untuk memperoleh jawaban dari pihak Siliwangi justru ditembaki oleh pasukan Siliwangi ketika masuk di wilayah Srambatan. Pasukan Panembahan Senopati yang sudah bersiap di bawah pimpinan Slamet Riyadi menyerang asrama Siliwangi di Srambatan. Pertempuran itu melibatkan Batalyon TLRI dibawah Tarno Tjakil dari Biro Perjuangan[29] dan dibantu Komando Pertempuran Surakarta. Pertempuran itu berlangsung dari pukul 13.00-18.00 diakhiri dengan perintah *case fire*penghentian tembak-menembak yang dikeluarkan langsung oleh Panglima Besar Sudirman dan setelah Jaksa Agung berhasil menemui pimpinan tentara dan sipil untuk mengadakan perundingan yang kemudian menghasilkan pengumuman bersama Dewan Pertahanan Daerah Surakarta no.12 tahun 1948.[30] Berhentinya tembak-menembak itu oleh pihak KPPS dimanfaatkan untuk mencari perwira-perwiranya yang hilang di markas Srambatan namun tidak ditemukan. Serangan terhadap Siliwangi di Surakarta membuat pasukan Siliwangi yang semula dalam posisi bertahan beralih menjadi posisi menyerang dengan mendatangkan bantuan dari luar kota Surakarta. Batalyon Siluman Merah pimpinan Mayor Achmad Wiranatakusumah, Batalyon Guntur/Brigade Siliwangi I pimpinan Mayor Daeng Mohammad, hizbullah, Barisan Banteng, dan Tentara Pelajar adalah pasukan pro pemerintah yang

---

[28]Julianto Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 175.

[29]Julius Pour, *Ign Slamet Riyadi dari Mengusir Kempetai sampai Menumpas RMS,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 78.

[30]Arsip Kodam VII Diponegoro, *Pengumuman Dewan Pertahanan Derah Surakarta no.12 Tahun 1948.*

didatangkan untuk membantu pasukan Siliwangi di Surakarta.[31] Brigade Sadikin melancarkan serangan dengan agresif, merebut inisiatif menguasai dan mendesak pasukan Panembahan Senopati keluar dari kota Solo. Pertempuran terjadi lewat tengah hari dengan melibatkan Kompi Lukas yang bertahan di Srambatan meluas ke Panasan dan Tasikmadu dibantu tiga batalyon dari Yogyakarta melawan Batalyon Digdo dari KPPS dan Batalyon 2 Resimen Jadau yang pro FDR.[32] Pasukan Siliwangi berhasil menguasai Kota Solo pada 17 September 1948.

Konflik bersenjata di Surakarta tidak hanya terjadi antara pasukan Siliwangi dan Panembahan Senopati, pasukan simpatisan dari kedua pihak yang berseteru juga ikut terlibat dalam aksi-aksi penyerobotan, penyerangan dan penggeledahan. Barisan Banteng yang merupakan urat militer GRR terlibat bentrok dengan Pesindo yang mendukung FDR. Tanggal 9 September 1948 terjadi penggerebekan terhadap markas besar Pesindo oleh gerombolan tidak dikenal yang menculik 12 orang dan mencuri dokumen serta surat-surat penting. Penggerebekan itu dilakukan oleh Barisan Banteng yang kemudian dibalas oleh Pesindo dengan melakukan aksi penculikan terhadap Dr. Moewardi pada 13 September 1948. Aksi Pesindo berlanjut dengan menculik Citromargoso dan Darmosalimin pada 14 September 1948 dan Barisan Banteng membalas dengan melakukan penggerebekan markas Pesindo di Singosaren dan di Gladag[33] serta menghancurkan kekuatan dan menguasai markas Pesindo.[34] Pesindo yang dalam kondisi tertekan di dalam kota yang telah diduduki pasukan Siliwangi mendapatkan bantuan dari sekutunya yaitu pasukan TLRI yang berbasis di luar

---

[31]Himawan Soetanto, *op.cit.*, hlm. 198.

[32]Arsip Kodam VII Diponegoro, *Sedjarah Kronologis TNI di Dalam Daerah Karesidenan Surakarta.*

[33]Lihat Lampiran 5 : Peta Kota Surakarta

[34]Julianto, *op.cit*., hlm. 176. *Buruh,* 17 September 1948. Serangan Barisan Banteng dibantu oleh 2 pasukan dari Siliwangi. George Mc. Turnan Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1995), hlm. 367-368.

kota Solo, bantuan pasukan TLRI ini dihadang oleh pasukan bantuan Siliwangi dari Yogyakarta sehingga pertempuran kembali terjadi dengan kekuatan yang tidak seimbang sehingga pasukan TLRI tercerai-berai ke pingiran kota Solo.

Kolonel Soeadi selaku Komandan PPS mengumpulkan sisa-sisa kekuatan Pesindo dan TLRI yang terpecah-pecah oleh serangan Siliwangi kemudian mengadakan serangan balasan dengan mendobrak pertahanan Barisan Banteng untuk menduduki kembali kota Solo pada 17 September 1948.[35] Upaya Kolonel Soeadi bersama TLRI dan Pesindo digagalkan oleh satuan-satuan Siliwangi yang telah menguasai kota dan kembali mereka dipukul mundur ke luar kota Solo. Bulan September 1948 seolah menjadi catatan kelam kota Surakarta karena tindakan kriminalitas, penculikan, pembunuhan, penggerebekan dan perang antar prajurit mewarnai hari-hari di bulan September di Surakarta. Kecurigaan, pelucutan senjata dan penghadangan atas kendaraan kesatuan baik Siliwangi maupun Panembahan Senopati terjadi dalam kurun waktu itu. Konflik kedua kesatuan berjalan seiring perkembangan situasi dan gejolak politik pemerintahan dan pergerakan FDR yang kemudian secara matang telah mempersiapkan pemberontakan terhadap Republik di Madiun.

C. Penyelesaian Konflik di Surakarta

Panglima Besar TNI Jendral Sudirman selaku pemimpin tertinggi angkatan perang yang memegang kendali atas seluruh kesatuan militer yang berdaulat dibawah nama besar Tentara Nasional Indonesia merasa bingung menghadapi situasi yang terjadi di Surakarta. Di satu sisi perannya sebagai Panglima tertinggi melihat prajuritnya termakan oleh hasutan partai-partai politik dan di sisi lain harus menjalankan perintah dari kabinet yang banyak merugikan kepentingan tentara karena semata merupakan kepentingan pemerintahan. Dilema yang dihadapi oleh pimpinan tentara atas kekacauan di Surakarta tidak hanya melibatkan masalah internal militer semata, namun juga berkaitan dengan isu-isu politik dan isu-isu strategis yang lebih luas. Satu sisi terlihat jelas kemungkinan bahwa FDR/PKI akan mampu menciptakan suasana tenang di Surakarta dan

[35]*Ibid.*

bahkan mungkin akan bertindak sendiri untuk mengupayakan pembebasan para sandera politik dan para perwira PPS yang bersimpati padanya.[36]Jendral Sudirman mengambil peran serta dalam upaya penyelesaian bentrokan militer yang terjadi di Surakarta sejak peristiwa pelucutan Mobil Brigade (MOBRIG) oleh pasukan TLRI pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Jadau,[37] peristiwa Tasikmadu antara Batalyon Rukman Siliwangi dengan Batalyon PPS yang diselesaikan secara hierarki militer dengan persetujuan dari kedua belah pihak memindahkan Batalyon Rukman keluar kota Surakarta.

Pemindahan Batalyon Rukman ternyata tidak dengan segera menyelesaikan masalah Siliwangi dengan Panembahan Senopati, peristiwa lanjutan terjadi di Srambatan pada 13 September 1948 antara Kompi Lukas Koestarjo dari Siliwangi dengan Brigade V Panembahan Senopati pimpinan Mayor Slamet Riyadi dibantu dua batalyon TLRI pimpinan Tarno Tjakil. Bentrokan senjata terhenti ketika Jendral Sudirman mengeluarkan order harian untuk penghentian tembak-menembak kedua pasukan dan selanjutnya memanggil pimpinan kedua pasukan untuk melakukan perundingan. Jendral Sudirman menemui Letnan Kolonel Soeadi di Loji Gandrung (bekas kediaman Gubernur Surakarta zaman kolonial)[38] untuk menerima aduan dari pihak KPPS sementara Jaksa Agung Tirtawinata menyiapkan pertemuan untuk perundingan di Balai Kota Surakarta. Pertemuan di Balai Kota dibuka pukul 17.00 oleh Jaksa Agung Tirtawinata dan dihadiri oleh Panglima KPPS Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Brigade II KRU Siliwangi Letnan Kolonel Sadikin, Kolonel Achmad Fajar dari Sub Teritorial Commando (STC) Surakarta, Mayor Achmadi Komandan Komando Militer Kota Solo, Mayor

[36]David Charles Anderson, *op.cit.*, hlm. 41.

[37]Pelucutan senjata MOBRIG ini termasuk salah satu langkah FDR untuk menghimpun pasukan yang sepaham dengan tujuan FDR dan menyingkirkan pasukan yang tidak dapat diajak bekerja sama seperti disebutkan dalam dokumen laporan siasat Letnan Kolonel Soejoto pelucutan senjata juga dilakuan terhadap Resimen BPRI Letnan Kolonel Mardjuki. Lihat lampiran 4 : ANRI, Kepolisian Negara no.40, *Laporan Siasat Letnan Kolonel Soejoto untuk merebut Karesidenan Surakarta.26-9-1948.*

[38]Julius Pour, *op.cit.*, hlm. 79.

Soedjono Komandan CPM Detasemen II, Residen Soediro Surakarta, Sjamsurizal Wali Kota Solo, dan Komisaris Saleh Sastronegoro Komandan Polisi Solo.[39]

Pertemuan di Balai Kota Solo itu menghasilkan kesepakatan bahwa semua kesatuan bersenjata harus melakukan *Konsigneering* dan semua pasukan dilarang membawa senjata ke luar asrama. Patroli keamanan hanya boleh dilakukan oleh CPM,KMK dan Polisi Negara[40]. Kesepakatan yang tercapai dalam perundingan tidak memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak karena tuntutan dan tujuan masing-masing pihak yang berseteru tidak terpenuhi. Keputusan itu diambil hanya karena perundingan berjalan alot dan tegang dimana kedua pihak saling menuding mengenai penyebab pertempuran itu. Panembahan Senopati menuntut perwiranya dikembalikan dan berdalih serangan dilakukan untuk mengambil kembali perwira Panembahan Senopati yang diculik dengan sebelumnya didahului ultimatum kepada markas Siliwangi di Srambatan. Siliwangi merasa tidak melakukan penculikan dan merasa dituduh atas tindakan itu, selain itu tindakan pengepungan dan penyerangan markas Siliwangi dinilai tidak beralasan sehingga Siliwangi berhak mempertahankan diri dan melakukan serangan balik.

Jendral Sudirman sebagai petinggi militer merasakan dilema atas keadaan itu, kemudian mengusulkan agar pasukan Siliwangi ditarik keluar dari Solo, atau secara total meninggalkan Surakarta secara bersama-sama dan menyerahkan secara penuh tanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di Surakarta.[41]Usulan itu ditanggapi dingin oleh A.H.Nasution, Letnan Kolonel Sadikin, dan Letnan Kolonel Abimanyu yang dengan segera mengemukakan alasan bahwa dengan pemindahan pasukan Siliwangi dari Surakarta hanya akan menimbulkan penafsiran bahwa kehadiran pasukan Siliwangi sudah tidak dibutuhkan. Kondisi itu tentu akan melukai hati prajurit Siliwangi dan dimungkin

---

[39]Sedjarah Militer Kodam VII Diponegoro, *Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*,(Semarang : Jajasan Penerbit Diponegoro,1968), hlm. 138.

[40]*Harian Merdeka*, 15 September 1948

[41]David Charles Anderson, op.cit., hlm. 35. Soe Hok Gie, *Simpang Kiri dari Sebuah Djalan : Kisah Pemberontakan PKI Madiun September 1948*, Thesis.M.A . Universitas Indonesia, 1969, hlm. 175-176.

kan mereka akan segera bersiap untuk pulang ke Jawa Barat yang jika demikian itu terjadi sama dengan pelanggaran atas persetujuan Renville dan menjadi alasan Belanda untuk kembali melakukan aksi agresinya.

Sebagai seorang prajurit Jendral Sudirman menghargai otoritas Panembahan Senopati di Surakarta meskipun tidak suka menerima perintah dari atasan (Rasionalisasi), Panembahan Senopati tetap menjalankan langkah-langkah rasionalisasi. Pemerintah harus menghargai bahwa Panembahan Senopati memiliki kebanggaan tradisional dalam membela Republik dan nilai kebanggan ini harus diperhitungkan ketika merencanakan perubahan mendasar atas militer di wilayah Surakarta.[42] Jabatan sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia juga menempatkan Jendral Sudirman dalam posisi sulit karena desakan dari pemerintah dan A.H.Nasution yang menuntut ketegasan Jendral Sudirman dalam menjalankan tugas untuk mengambil tindakan tegas kepada Panembahan Senopati tanpa perlu adanya Perundingan. A.H.Nasution menuding bahwa dalam tubuh pasukan Panembahan Senopati terdapat personel tentara yang nakal dan telah terpengaruh oleh golongan kiri melalui kursus-kursus politik golongan kiri.[43]

Jendral Sudirman mengkawatirkan apabila angkatan bersenjata terseret dalam arena pertikaian antar kelompok, dan akan kehilangan kepedulian atas tujuan revolusi sehingga menjadi perpanjangan tangan partai politik dalam memperoleh kekuasaan dan pengaruh.[44] Kebijakan Jendral Sudirman dalam rangka membebaskan angkatan bersenjata dari konflik-konflik antar partai menemui kesulitan dalam pelaksanaannya karena ruang gerak dan wewenangnya yang terbatas dalam tubuh tentara sendiri, karena posisinya dibawah Menteri Pertahanan sehingga tidak dapat secara penuh mengatur dan menggerakkan tentara di bawah perintahnya.

---

[42]*Merdeka*, 24 Juli 1948.

[43]A.H.Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8 Pemberontakan PKI Madiun*, (Bandung: Angkasa, 1979), hlm. 217.

[44]David Charles Anderson, *op.cit*., hlm. 36.

Dualisme pimpinan militer seakan melemahkanposisi Jendral Sudirman sebagai Panglima Tertinggi TNI yang kewibawaannya dilangkahi oleh Muhammad Hatta sebagai Menteri Pertahanan.[45]

Perundingan damai yang digelar di Balai Kota Solo jelas menemui jalan buntu sehingga kemudian Panglima Besar Sudirman menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan atas usulan perdamaian yang diajukan sebelumnya. Hasil perbaikan itu adalah diadakannya penyelidikan atas penculikan perwira-perwira Panembahan Senopati dan seputar peristiwa penyerangan atas asrama Siliwangi di Srambatan,yang dipimpin oleh Komandan Korps Polisi Militer Kolonel Gatot Subroto[46] pada 15 September 1948. Langkah penyelidikan dilakukan untuk sedikitnya meredam amarah PPS yang dalam hal itu mengalami pukulan berat dengan hilangnya perwira-perwira dan kekalahan dalam insiden di Tasikmadu dan Srambatan. Gatot Subroto menegaskan bahwa tindakan penculikan dan pertikaian di Surakarta merupakan pelanggaran atas kedaulatan angkatan bersenjata yang kemudian ditegaskan lagi oleh Jendral Sudirman bahwa angkatan bersenjata

[45]Bulan Juli dalam aksi pemogokan yang dilakukan oleh buruh perkebunan dan pabrik karung goni di Delanggu, Muhammad Hatta memerintahkan pengiriman pasukan TNI reguler ke wilayah itu tanpa melalui Jendral Sudirman. *Berita Indonesia*, 16 Juli 1948.

[46]Gatot Subroto dilahirkan pada Oktober 1909 di Purwokerto Jawa Tengah. Sebelum perang bekerja sebagai seorang sersan di kesatuan KNIL baik di Jawa maupun di pulau-pulau luar Jawa. Pada tahun 1934 memasuki sekolah kepolisian di Sukabumi, dan pada masa pendudukan Jepang jabatannya dinaikkan sebagai inspektur polisi di Karesidenan Banyumas. Tahun 1943 diangkat menjadi komandan kompi pada sebuah batalyon Peta di Sumpiuh, dan kemudian menjadi komandan batalyonnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Gatot Subroto menerima penyerahan secara resmi atas persenjataan dan peralatan perang dari tentara Jepang yang kemudian dipergunakan untuk melengkapi Divisi TKR yang dipimpin Jendral Sudirman. Pertengahan tahun 1946 Gatot Subroto memimpin Divisi Sunan Gunung Jati, yang merupakan divisi tentara reguler di Purwokerto dan didekati Muhammad Hatta dan Suryadarma pada April 1948 untuk memimpin Corps Polisi Militer (CPM), yang keanggotaannya tersusun atas anggota-anggota terpilih dari kelompok-kelompok polisi seperti Tentara Polisi, Polisi Tentara Laut, Polisi Angkatan Udara dan Pengawas TNI. David Charles Anderson, *op. cit.*, hlm. 39.

sebagai alat kekuasaan negara yang bertugas menjaga keutuhan Republik dari serangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selama masa perundingan dan pencapaian kesepakatan antara para petinggi militer berlangsung dan para tentara reguler ditertibkan oleh komandannya masing-masing, gejolak terjadi diantara pasukan tentara non Reguler yaitu Pesindo dan Barisan Banteng yang saling menggerebek, menculik dan melakukan aksi-aksi kriminal sehingga membuat suasana di Surakarta semakin kacau karena konflik sebelumnya belum terselesaikan. Menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali kemudian Jendral Sudirman mengingatkan agar para pemimpin negara dan pemimpin tentara yang telah sepakat mengambil langkah guna menjamin keamanan umum di wilayah Surakarta dan tidak ragu-ragu menerapkannya di daerah Republik lainnya.[47]

Muhammad Hatta dalam menjalankan perannya sebagai perdana menteri berjanji bahwa kabinetnya akan mengambil tindakan drastis dalam melawan para pengacau dan pengancam yang menyebarkan propaganda kebencian anti pemerintah yang mengganggu jalannya demokrasi.[48] Langkah Muhammad Hatta ini tentu sedikit banyak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyingkirkan pengacau yang dalam hal ini ditujukan pada golongan komunis FDR dan pasukan Panembahan Senopati yang pro FDR. Pengerahan kekuatan militer tentu harus dilakukan di bawah komando Jendral Sudirman, namun Jendral Sudirman dalam posisi dilematisnya justru mengalami krisis kepemimpinan karena Siliwangi tidak berpihak pada Panglima tertinggi namun berpihak dan bertindak sebagai tentara Kabinet Muhammad Hatta.

Pembicaraan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan di Surakarta dilakukan di Yogyakarta oleh Jendral Sudirman, A.H.Nasution dan Kolonel Gatot Subroto pada 16 September 1948.[49] Pertemuan itu menghasilkan keputusan

---

[47]*Antara*, 16 September 1948.

[48]*Merdeka,* 3 September 1948.

[49]Himawan Sutanto, *op.cit*., hlm. 198.

pengangkatan Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer di Surakarta yang berwenang atas semua alat negara serta berhak sepenuhnya menjalankan tugas-tugas dewan pertahanan.[50] Pengangkatan Gubernur Militer tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas itu, maka dengan persetujuan Presiden dan Kabinet kemudian Gatot Subroto datang ke Surakarta pada 18 September 1948 untuk melaksanakan tugasnya dengan dibantu Letnan Kolonel Bambang Sugeng dan Muljanto Wakil Jaksa Agung sebagai penasehat.[51]

Langkah yang dilakukan Kolonel Gatot Subroto adalah dengan mengeluarkan intruksi untuk semua angkatan bersenjata di Surakarta agar menghentikan tembak-menembak selambat-lambatnya tanggal 20 September 1948 pukul 24.00, dan keesokan harinya semua komandan pasukan harus melaporkan menghadap pada Gubernur Militer. Komandan pasukan yang menghadap kemudian akan dikumpulkan untuk membicarakan penyelesaian bersama atas masalah di Surakarta. Komandan pasukan yang tidak menghadap dan tidak patuh akan dianggap pemberontak dan akan ditumpas.[52]Bertepatan dengan keluarnya intruksi tersebut, pasukan Panembahan Senopati yang terlibat pertempuran dengan Siliwangi telah terdesak mundur ke luar kota dan melakukan pemberontakan di Madiun bersama FDR (Pemberontakan PKI Madiun).[53] Pemberontakan itu memberikan kejelasan bahwa pertempuran di Surakarta itu didalangi oleh PKI sehingga kini jelas bahwa musuh negara adalah PKI. Tanggal 21 September 1948 Panglima Pertahanan Jawa Tengah Kolonel Bambang Sugeng

---

[50]ANRI. *Pengumuman Pemerintah No.1/1948. Pengangkatan Komandan Militer Karesidenan Surakarta. 16 September 1948.*

[51]David Charles Anderson, *op.cit.* , hlm. 42.

[52]Arsip Kodam VII Diponegoro, *Pengumuman No.13. Gubernur Militer Surakarta Gatot Subroto. 18-9-1948*. *Merdeka*,20 September 1948.

[53]Dengan keluarnya intruksi Gubernur Militer tersebut , maka pasukan Panembahan Senopati mengalami demoralisasi, dan praktis tidak memiliki pilihan lain, mereka dianggap pengkhianat yang menimbulkan kekacauan di Kota Surakarta, dan jika menghadap sama halnya membawa diri pada penyerahan tanpa syarat kepada pemeritah. David Charles Anderson. *op.cit.,* hlm. 47.

bersama Panglima Besar Sudirman datang ke Surakarta untuk menyampaikan perintah dan memberikan penjelasan operasional yang diperlukan.[54] Kunjungan Panglima Besar Sudirman juga menyinggahi markas kesatuan Siliwangi dan Panembahan Senopati untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua kesatuan dengan memberikan kejelasan bahwa pertikaian yang terjadi sengaja dibuat oleh PKI yang menginfiltrasikan ideologinya ke dalam tubuh TNI. TNI sebagai tentara negara tidak boleh membela kepentingan golongan manapun dan harus membela kepentingan negara dalam situasi ini TNI kemudian dikerahkan untuk menumpas PKI yang mengacaukan negara.

[54]*Kedaulatan Rakyat*, 23 September 1948.